

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan akan dijadikan referensi oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul	Hasil Penelitian	Perbandingan
1.	M. Muarifuddin (2017) dengan judul Implementasi Pembangunan Desa Wisata Batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang	Proses pembangunan dari perencanaan telah adanya aktivitas membuat. Pelaksanaan terciptanya interaksi antara pengrajin dan pembatik yang terjalin hubungan patron-klien. Wujud partisipasi bersumber dari masyarakat lokal dan sistem sosial diluar masyarakat. Faktor pendukung berupa daya dukung fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor penghambat berupa tidak semua warga setempat bisa membuat. Dampak secara fisik adanya peningkatan infrastuktur, dan dampak nonfisik terdapatnya peningkatan yang terdiri dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.	Peneliti akan membahas mengenai implementasi program desa wisata di hendrosari terhadap perekonomian masyarakat desa setempat, berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai pembangunan desa wisatanya.
2.	Prihasbi Cahya Adisasmita (2016) dengan judul Implementasi	1) implementasi kebijakan SK DISBUDPAR nomor 556/21/KEP/412.106/2015 di desa wisata Pujon Kidul meliputi keberadaan obyek	Persamaannya yaitu membahas bagaimana implementasi program desa wisata tetapi perbedaannya yaitu

	<p>Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan (Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)</p>	<p>wisata alam sumber air terjun dan edukasi petik sayur, perah susu, dan biogas. Keberadaan komunitas dari masyarakat lokal di bidang wisata, adanya fasilitas sarana prasarana dasar yang mendukung kegiatan di bidang wisata, promosi, atau pemasaran selain dengan mengikuti program pengembangan pariwisata yang diadakan Disbudpar Kabupaten Malang juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul hanya melalui promosi dari mulut ke mulut dan media elektronik. 2) Pembangunan desa berkelanjutan Desa Pujon Kidul pada aspek ekonomi meliputi potensi yang dimiliki desa terutama pada sektor pariwisata yang mengutamakan pedagangan dan jasa karena perekonomian masyarakat Desa Pujon Kidul mayoritas bergantung dari sektor tersebut. pada aspek sosial berkaitan dengan partisipasi aktif dalam pembangunan desa dan bermasyarakat masyarakat Desa Pujon Kidul. Sedangkan pada aspek lingkungan yakni pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan sampah. 3)</p>	<p>membahas mengenai pengembangan dan pembangunan desanya.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

		Faktor pendukung meliputi faktor internal yakni budaya gotong royong dan faktor eksternal yakni obyek wisata alam sumber air terjun yang lebih dikenal masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambat yakni rendahnya pemahaman masyarakat.	
3.	Yohanes R. Juanda, Maesaroh, Amni Z. Rahman (2016) dengan judul Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Desa Wisata di Kelurahan Kandiri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, ada masalah yang berkaitan dengan kesesuaian kegiatan dengan kondisi masyarakat setempat, penugasan komunitas sasaran; dan proses perubahan masyarakat setempat menjadi pengusaha di bidang pariwisata sektor. Faktor penghambat implementasi pemberdayaan masyarakat adalah kejelasan dan standar kebijakan, komitmen pemerintah, kondisi sosial dan ekonomi, dan disposisi pelaksana. Rekomendasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah: meningkatkan partisipasi Dinas Pariwisata dalam pengembangan Kelompok Sadar Wisata (PokDarwis) di Desa Kandiri, menyesuaikan dengan Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis Sukomakmur; Pemerintah membuat pedoman untuk pelaksanaan terhadap kegiatan yang dilakukan; dan	Persamaannya membahas mengenai desa wisata dan bagaimana pelaksanaannya, tetapi bedanya disini juga membahas bagaimana pemberdayaan masyarakatnya dan kebijakannya.

		menghapus alokasi anggaran yang kurang mendukung kegiatan.	
4.	Nihla Hikmania (2019) dengan judul Peran Desa Wisata Kampung Susu Dinasty Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung	Desa Wisata Kampung Susu Dinasty mampu meningkatkan pendapatan Desa Sidem. Dalam proses dimulai dengan pengembangan desa ini akan menjadikan masyarakat Desa Sidem sebagai sumber daya manusia berupa tenaga kerja, dengan demikian akan membantu kesejahteraan masyarakat Desa Sidem. Berkembangnya desa wisata di Desa Sidem akan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Namun ada satu hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan desa wisata tersebut diantaranya keterampilan yang dimiliki masyarakat untuk menjadi pekerja/karyawan di kampung susu dynasty. Untuk kontribusi peningkatan pendapatan desa Pemerintah Desa Sidem sendiri sudah fokus terhadap peningkatan pembangunan fisik dan non fisik hingga saat ini.	Hampir sama dengan apa yang akandibahas oleh peneliti, yaitu mengenai perekonomian masyarakat desa wisata. Selain itu peneliti juga akan membahas mengenai pelaksanaan desa wisata di Desa Hendrosari, berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas mengenai peran desa wisata.
5.	Hary Hermawan (2016) Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap	Pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran diantaranya: penghasilan masyarakat	Peneliti akan membahas mengenai bagaimana implementasi program desa wisata di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten

	Ekonomi Masyarakat Lokal	meningkat; meningkatkan peluang kerja dan berusaha; meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal; meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga barang tidak ditemukan	Gresik dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakatnya tetapi tidak membahas bagaimana pengembangan pariwisatanya.
6.	Wiwin Indiarti, Abdul Munir (2016) The Implementation of Community-based Ecotourism Concept in Osing Tourism Village Development Strategy of Banyuwangi Regency, Indonesia	Result of the assessment of internal and external factors in the development of Osing tourism village with CBE concept as a whole can be formulated in 12 prioritized development strategies comprising: (1) increasing the community participation; (2) increasing the community understanding on the importance of nature conservation and Osing cultural values; (3) increasing synergy and coordination among stakeholders in Kemiren tourism developmen; (4) enhancing the growth of creative industries and marketing facilities based on the local knowledge as the supporters of tourism development; (5) increasing human resources quality in the management of tourism village; (6) having coordination and cooperation	Persamaannya yaitu membahas mengenai partisipasi masyarakat desa setempat dalam pelaksanaan dan pengembangan desa wisata. Perbedaannya di penelitian ini membahas strategi mengenai pengembangan pariwisata.

		<p>in promotion with tourism objects manager of the closest areas.; (7) enhancing promotion and integrated information service about tourism program; (8) developing the local potency-based tourism village in other villages in Glagah District; (9) having coordination and cooperation with higher institution, especially the research centers as partner in tourism development.; (10) creating community-based tourism program ; (11) increasing cooperation with other villages having tourism potencies in tourism development.; and (12) procurement of transportation access and other facilities by using sustainable tourism concept.</p>	
7.	<p>Saiful Deni, Thamrin Husain, Anggriyani Salaka, Zubair Saing (2019) “The Implementation of Bobanehena Tourism Village Development in West Halmahera Regency”</p>	<p>The results found that there was excellent communication between central, regional, and village governments. Besides, the Bobanehena society support who warmly welcomed the tourism development program in their village, and the most crucial thing is sufficient funding sources in tourism developing process supporting facilities. Meanwhile, there is a positive attitude that supports</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi desa wisata dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setempat.</p>

		<p>implementation success. Following, the fulfilment of standard operation procedure (SOP) by Bobanehena tourist village from the central government. The tourist village's development through community empowerment, increasing tourist visits number, destination development using attractions, amenities and visible accessibility, and growing people income.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Konsep Kebijakan Publik

2.2.1.1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai lingkup luas yang mencakup beberapa sektor dan bidang, seperti politik, sosial, hukum, ekonomi, budaya dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Dr. Taufiqrokhman, 2014).

Menurut Thomas R. Dye (1978) dalam kutipan Prof. Dr. Muh. Irfan Islamy, MPA. (2014, hal. 3) menjelaskan “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*” yang artinya kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Penjelasan tersebut termasuk singkat atau tidak kompleks, tetapi banyak mendapat perhatian di kalangan ahli kebijakan untuk ditelaah. Menurut Dye, kebijakan publik tidak hanya fokus kepada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tetapi juga apa yang tidak dilakukannya, hal ini dikarenakan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan mempunyai akibat yang sama untuk masyarakat.

Menurut Nugroho dalam kutipan Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M. Si (2014, hal. 4), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Menurut beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah, anggota organisasi atau seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diberlakukan di lingkungan masyarakat.

2.2.1.2. Kategori kebijakan publik

Menurut Anderson didalam kutipan Prof. Dr.Muh. Irfan Islamy, MPA (2014) membedakan 6 jenis kebijakan, yaitu:

- a. *Substantive policies* (kebijakan substantif) adalah kebijakan tentang apa yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah, seperti kebijakan standar upah buruh; kebijakan pembangunan berkelanjutan; kebijakan kesehatan; kebijakan pendidikan, dan sebagainya.
- b. *Procedural policies* (kebijakan prosedural) adalah kebijakan tentang siapa yang akan terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut serta bagaimana kebijakan itu hendak dilaksanakan, seperti kebijakan perumusan UU; kebijakan pilkada; kebijakan ekspor dan impor; kebijakan uji materi UU dan sebagainya.
- c. *Regulatory policies* (kebijakan regulatory) adalah kebijakan untuk mengatur atau mengendalikan tindakan individu atau kelompok. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan atau diskresi/keleluasaan bertindak dari mereka yang diatur atau hendak dikendalikan perilakunya. Dapat dicontohkan disini, misalnya kebijakan tindak kriminal; kebijakan peredaran minuman beralkohol; kebijakan persaingan usaha; kebijakan merokok di tempat umum; dan sebagainya.

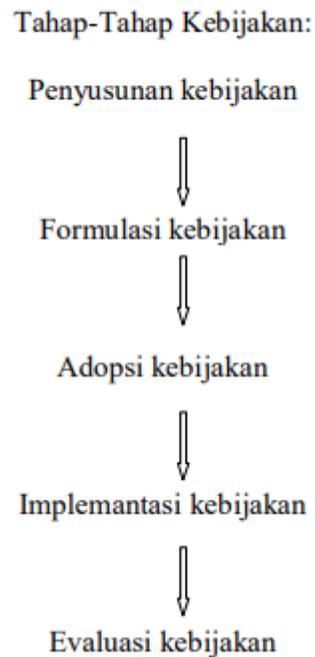
- d. *Self-regulatory policies*, kebijakan tipe ini sama dengan kebijakan regulatoris yaitu sama-sama mengatur dan mengendalikan perilaku individu-atau kelompok, hanya saja bedanya adalah kebijakan jenis ini lebih banyak dicari dan didukung oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan ini yakni untuk melindungi diri atau meningkatkan tercapainya kepentingannya sendiri. Contoh kebijakan jenis ini adalah misalnya kebijakan sertifikasi dosen; kebijakan standarisasi produk; kebijakan harga eceran produk perrtanian, dan sebagainya.
- e. *Distributive policies* (kebijakan distirbutif) adalah kebijakan untuk memberikan atau mendistribusikan pelayanan atau keuntungan tertentu kepada kelompok penduduk tertentu misalnya indiviu, kelompok masyarakat, atau perusahaan dari dana pemerintah. Tujuannya adalah mendorong individu atau kelompok atau perusahaan untuk meningkatkan aktivitasnya yang dinilai punya misi sosial atau sangatdiinginkan masyarakat. Contoh kebijakan jenis ini misalnya kebijakan BOS di bidang pendidikan; kebijakan jaminan pelayanan kesehatan bagi kelompok miski; kebijakan subsidi pemilikan rumah sederhana, dan sebagainya.
- f. *Redistributive policies* (kebijakan redistributif) adalah kebijakan untuk mengalokasikan kembali kekayaan atau kemakmuran ekonomi atau hak-hak, dari satukelompok kepada kelompok lain. Contoh misalnya kebijakan perang melawan kemiskinan; kebijakan pajak pendapatan; kebijakan hak meilih di pemilu; kebijakan kesejahteraan sosial, dan sebagainya.

2.2.1.3. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik melalui proses dan tahap-tahap yang kompleks dan melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Maka dari itu para ahli politik yang mempelajari kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik dalam beberapa tahap yang bertujuan untuk memudahkankita pada saat mengkaji atau mempelajari kebijakan publik. Pembagian proses penyusunan yang dilakukan oleh para ahli berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2007, hal. 32-34) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda
Para pembuat kebijakan diharuskan untuk menempatkan permasalahan publik yang ada untuk penyusunan agenda. Sebelum dimasukkan ke dalam penyusunan agenda, permasalahan di kaji terlebih dahulu, karena ada beberapa masalah yang masing-masing porsi penanganannya juga berbeda. Permasalahan yang dipilih, yakni permasalahan yang *urgen* terlebih dahulu dan dijadikan fokus pembahasannya. Sedangkan permasalahan yang lain diselesaikan setelahnya.
- b. Tahap formulasi kebijakan
Permasalahan yang telah masuk ke dalam penyusunan agenda kemudian di bahas untuk menemukan cara pemecahan masalah yang terbaik (*problem solving*). Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai pilihan alternatif terbaik (*policy options*) yang ada. Perumusan kebijakan tersebut berasal dari masing-masing aktor dan akan bersaing untuk mengusulkan pemecahan masalah yang baik menurutnya dan berusaha agar dapat memberikan yang terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan
Beberapa alternatif pemecahan masalah yang telah dirumuskan tersebut, akan ada salah satu alternatif kebijakan yang dipilih untuk diadopsi dengan melalui dukungan dan persetujuan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan
Setelah kebijakan diadopsi dan disetujui, maka program kebijakan tersebut akan diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan.
- e. Tahap evaluasi kebijakan
Kebijakan yang telah dilaksanakan akan di evaluasi atau dinilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah dan bagaimana dampaknya untuk masyarakat. Maka dari itu terdapat ukuran-ukuran untuk menjadi dasar penilaian kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai tujuannya atau belum.

Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan publik



2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan

2.2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam Bahasa Inggris yaitu "*Implementation*" yang berasal dari kata kerja "*to Implement*" menurut *Webster's Dictionary* (Tachan, 2008). Kata "*to implement*" berasal dari bahasa latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*", kata "*implore*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*" yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*" yaitu mengisi.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan praktek dari kebijakan publik yang telah disetujui atau bersifat praktis dan juga salah satu proses yang penting, berbeda dengan formulasi kebijakan yang bersifat teoritis karena hanya berupa perumusan kebijakan publik saja. Sedangkan menurut Van

Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2005, hal. 102) mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Maka yang dimaksud implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan pelaksanaan atau penyelesaian suatu kebijakan publik yang telah disetujui atau ditetapkan oleh pemerintah, anggota organisasi ataupun seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan kepada sasaran yang tepat. Didalam proses implementasi kebijakan publik menjadi tolok ukur suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Apabila kebijakan publik diimplementasikan secara benar, maka seluruh tujuan akan tercapai dan memberikan dampak yang baik bagi sasaran kebijakan publik.

2.2.2.2. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik terdapat 2 pendekatan yakni pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top down* yang dilakukan ternetralisir dan dimulai dari aktor-aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Salah satu yang menganut aliran *top down* adalah Van Meter dan Van Horn. Terdapat 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam Agustino (2008, hal. 141-144), yaitu:

- a) Ukuran dan tujuan
Merupakan hal yang penting untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan, hal ini dilakukan agar kebijakan publik yang sudah direncanakan dapat sesuai dengan keinginan. Sasaran dan kejelasan program harus dapat dilihat secara spesifik agar dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang sudah direncanakan.
- b) Sumber Daya

Terdapat bermacam-macam sumber yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu sumber daya manusia, sumber daya biaya dan sumber daya waktu. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana program kebijakan publik. Sedangkan sumber daya biaya atau modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan kebijakan, karena tanpa adanya biaya akan menghambat proses implementasi kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Salah satu faktor keberhasilan kebijakan juga dapat dilihat dari sifat atau ciri-ciri instansi/badan pelaksana kebijakan. Hal tersebut sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

d) Sikap / Kecenderungan para Pelaksana

Sikap/kecenderungan para pelaksana dalam implementasi kebijakan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan para pelaksana lah yang merumuskan kebijakan dan bukan warga atau masyarakat.

e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

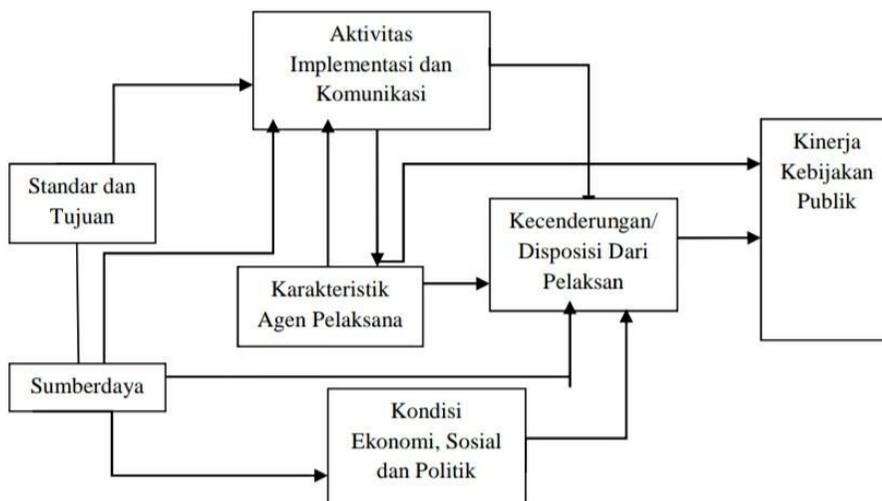
Komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun komunikasi antar aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik komunikasi yang terjalin maka semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu proses implementasi.

f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena jika lingkungan eksternal tersebut kondusif maka akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Berikut penjelasan gambar bagan Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn secara singkat:

Gambar 2.2 Teori implementasi Van Meter Van Horn



2.2.3. Konsep Desa Wisata

2.2.3.1. Pengertian Desa Wisata

Sebelum menjelaskan pengertian desa wisata, peneliti akan membahas pengertian desa terlebih dahulu. Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Pengertian desa juga dipaparkan oleh para ahli, menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953) yang dikutip oleh Naifular (2020) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Bintarto (1983) juga menjelaskan bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ayat (1) tentang desa, bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa wisata merupakan salah satu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal. Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Sedangkan menurut Wiendu (1993) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Desa wisata rata-rata merupakan daerah pedesaan yang mempunyai potensi untuk dijadikan kawasan wisata dengan mempunyai ciri khas atau karakteristik yang bisa dikembangkan. Ciri khas atau karakteristik tersebut bisa berupa suasana alamnya yang masih asri, budaya adat istiadat yang masih terjaga. Selain ciri khas tersebut, terdapat makanan, sistem pertanian, hasil kebun, hasil laut, yang bisa dieksplor dan dijadikan daya tarik tersendiri di kawasan desa wisata. Tetapi biasanya yang menjadi daya tarik utama desa wisata adalah kondisi alamnya yang indah dan masih terjaga dengan baik.

2.2.3.2. Unsur Desa Wisata

Syarat dapat berdirinya desa wisata adalah dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai sebagai kawasan wisata. Hal ini dimaksudkan agar wisatawan yang berkunjung dapat menikmati wisatanya dengan nyaman dan aman. Fasilitas yang dimaksud yaitu adanya kamar mandi, tempat parkir, penginapan, transportasi, akomodasi dan juga ada fasilitas kesehatan. Selain itu juga dapat ditambahkan pusat penjualan oleh-oleh dan juga kuliner khas daerah dapat membantu mengenalkan kuliner khas disana dan dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001), penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut :

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Selain persyaratan diatas, terdapat juga 3 karakteristik utama yang harus diperhatikan dalam mendirikan obyek wisata, sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Oka A. Yoeti (1985) didalam kutipan Antonius, karakteristik tersebut antara lain :

- a) Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*”. Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, daerah itu harus mempunyai daya tarik yang khusus dan unik.
- b) Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to do*”. Artinya di tempat tersebut selain banyak yang dapat disaksikan, harus disediakan pula fasilitas rekreasi atau amusement yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu.
- c) Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to buy*”. Artinya di tempat tersebut harus ada fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh dibawa pulang.

2.2.3.3. Manfaat Desa Wisata

Adanya pariwisata akan memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga dari berbagai aspek lainnya. Berikut adalah manfaat dari adanya desa wisata:

- a. Ekonomi

Adanya desa wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, hal ini dikarenakan masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaannya. Masyarakat juga bisa menambah pendapatan mereka dengan membuka usaha di sekitar kawasan wisata. Selain meningkatkan perekonomian lokal, desa wisata juga dapat meningkatkan perekonomian regional maupun nasional.

b. Sosial

Dengan adanya desa wisata dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu juga dapat meningkatkan jiwa usaha kepada masyarakat desa yang rata-rata profesinya sebagai petani.

c. Budaya

Desa wisata memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Dengan adanya banyak wisatawan yang datang, dan apabila warga setempat menunjukkan kebudayaan yang ada didesanya, maka akan sekaligus memperkenalkan budaya yang ada ke masyarakat luar yang awam terhadap kebudayaannya.

2.2.3.4. Tinjauan Desa Wisata

A. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang atau desa swadaya merupakan desa yang masih kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kurang pendanaan, sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya secara maksimal. Biasanya letak desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

B. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

C. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sdm/sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

2.3. Kerangka berpikir

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan merupakan kelanjutan dari perumusan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan diperlukan usaha dari pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Hasil dari implementasi kebijakan tersebut akan menentukan apakah kebijakan yang dibuat sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Apabila terlaksana dengan baik, maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang akan dijelaskan di tabel sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

